

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat melihat sosok anak punk, sering kali masyarakat menganggap sebelah mata anak punk itu sendiri. Menganggap anak punk itu aneh, mengerikan, mengganggu pemandangan, pemakai narkoba, tidak memiliki moral, sampah masyarakat, tukang pembuat onar dan lain sebagainya dalam pemaknaan negatif (G, 2010:11). Dipandang remeh dan sebelah mata oleh masyarakat, karena cenderung bebas dan dianggap “liar” inilah seolah-olah melekat dan menjadi identitas anak punk (Lova, 2019).

Sabin (1999:2) mengatakan bahwa punk merupakan subkultur yang paling dicirikan sebagai bagian dari pemberontakan kaum muda. Pemberontakan ini terjadi berawal pada tahun 1976 dan muncul pertama kali di Inggris dan Amerika. Kemunculan pemberontakan ini terjadi karena ada gerakan anak-anak kelas pekerja yang memiliki kegelisahan ketika melihat keadaan sosial dan politik yang kacau akibat kemerosotan moral tokoh politik yang memicu tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi (Wijaya, 2019).

Punk yang memberontak mengungkapkan perasaan atau kritikan mereka melalui musik dan grup musik yang mempelopornya ada Sex Pistols, The Ramones, dan Clash yang mempengaruhi perkembangan musik punk (Sabin, 1999:2). Hebdige menjelaskan bahwa musik menjadi sebuah bentuk resistensi kaum tertentu. Cohen juga mengatakan bahwa musik dianggap sesuatu yang dianggap sesuatu yang eksotis dan pragmatis diantara remaja (Wulan, 2014: 268).

Martono mengatakan bahwa, seiring berjalannya waktu, subkultur punk ini menyeruak masuk ke Indonesia ketika taraf perekonomian kota-kota di Indonesia meningkat dan arus informasi global yang kian terbuka. Hal ini terjadi karena terbukanya Indonesia dengan hal baru. Awal perkembangan punk yang masuk ke

Indonesia sebatas adaptasi gaya berpakaian, karena gaya berpakaian merupakan hal yang paling mudah diserap dan diterima. Tahun-tahun berikutnya, Indonesia juga baru mulai menerima etika D.I.Y (*Do-It-Yourself*) dan anarkisme. Pemahaman tentang punk di Indonesia semakin berkembang karena adanya semangat perlawanan terhadap Pemerintahan Orde Baru. Indonesia juga semakin terbuka terhadap punk setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Grup musik punk di Indonesia juga makin bermunculan dan menyuarakan musik punk. Juga, mengindikasikan bahwa musik punk sudah mulai akrab dengan remaja Indonesia (Martono, 2019:52).

Kemunculan punk di Indonesia terus bertambah, tidak terkecuali Provinsi Aceh. Provinsi Aceh dalam sejarahnya, merupakan daerah pertama kali masuknya agama Islam di Indonesia, juga pertama kali dibangunnya kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Peureulak dan Pasai. Kerajaan ini semakin lama bertambah luas wilayahnya sehingga pada masa itu Islam sangat berpengaruh dalam hal agama dan kebudayaan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Sampai akhirnya Aceh mendapat julukan “Seuramo Mekkah” atau yang bisa disebut dengan Serambi Mekkah (Pemerintah Aceh, 2014)

Selain itu, Aceh mendapat mendapat kebebasan atau wewenang khusus karena Aceh pernah memiliki sejarah konflik dengan pemerintahan pusat atas ketidakpuasan rakyat Aceh yang merasa tidak adil. Salah satunya karena adanya kebijakan pemerintahan pusat yang sentralistik tidak sesuai dengan kenyataan dan yang diharapkan di berbagai bidang khususnya di bidang pembangunan di Aceh (Jayanti, 2013: 2).

Rakyat Aceh dibuat kecewa karena sumber daya alam di Aceh dieksploitasi secara besar-besaran oleh pemerintahan pusat tanpa pembagian yang sesuai antara pemerintahan pusat dengan Aceh. Hal inilah yang membuat Hasan Tiro mencetuskan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang meyakini Aceh dapat berdiri sendiri dan tidak perlu bergantung dengan pemerintahan pusat, karena pada sejarahnya di masa lalu Aceh berjaya (Pratiwi, 2019: 84). Lahirnya gerakan ini membuat pemerintah pusat mencoba menyelesaikan konflik ini dengan menjalankan operasi yang mengirimkan militer dan pejabat-pejabat sipil untuk untuk menepati posisi strategis di Aceh. Operasi ini di kenal

sebagai operasi DOM (Daerah Operasi Militer). Operasi ini yang kemudian memunculkan berbagai tindak kekerasan dan rasa sakit hati bagi rakyat Aceh yang akhirnya memunculkan pelanggaran HAM (Adnan dalam Pratiwi, 2019: 84).

Kemudian, sebelum tahun 2000 komunitas punk muncul di kota Banda Aceh. Saat itu, mulai didirikannya beberapa band rock dan mengadakan beberapa festival musik sebagai cara untuk melawan sengketa politik yang tidak pernah berakhir di Aceh. Masyarakat Aceh dikejutkan dengan kehadiran pemuda karena berdandan aneh. Komunitas punk ini terlihat berbeda dari dengan masyarakat Aceh karena mereka memainkan musik dan terlihat di jalanan Kota Banda Aceh. Beberapa orang mengeluhkan keberadaan punk di Banda Aceh lewat media, dengan alasan mereka terlihat ‘aneh dan tidak Islami’. Juga karena budaya punk bukanlah bagian dari budaya Aceh. Beberapa orang tua juga merasa khawatir dan takut anak-anak mereka akan bergabung dengan komunitas punk. Sejak saat itu, komunitas punk menjadi incaran polisi syariah dengan melakukan razia rutin. Setelahnya komunitas yang tertangkap akan dipenjara selama beberapa hari sampai akhirnya dipulangkan ke orang tua masing-masing (Dijk (ed), Tanpa Tahun :321).

Di Kota Banda Aceh pada 26 Desember 2004, telah terjadi bencana alam Tsunami yang menelan hingga ratusan ribu korban jiwa. Lalu, setelah adanya Tsunami komunitas punk yang dikatakan sebelumnya sudah ada sebelum tahun 2000 sempat tidak terlihat kemunculannya. Namun, tidak berlangsung lama sekumpulan pemuda punk kembali menjamur. Hal ini membuat Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi geram dan lambat laun melarang anak punk rock untuk berkeliaran di Banda Aceh, karena Kota Aceh sekarang menganut sistem hukum syariah atau hukum Islam (Hafid, 2016).

Pada tahun 2011, Pemerintahan Kota Aceh menangkap 65 anak punk. Mereka ditangkap ketika menggelar konser amal bertajuk “Aceh for the Punx” di Taman Budaya, Banda Aceh, pada tanggal 10 Desember 2011. Walaupun konser ini dikatakan sebagai konser amal, namun polisi dan pemerintah percaya bahwa, adanya konser ini telah meresahkan warga. Bahkan para *punker* mendapatkan izin konser dengan membohongi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan memalsukan surat

izin yang mengatasnamakan organisasi lain. Razia dilakukan para pihak polisi saat konser diadakan dengan beberapa bukti narkoba dan minuman keras. Wakil Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal, dalam Tempo.co mengatakan, ada banyak keluhan masyarakat terhadap keberadaan komunitas mereka, yang juga terlibat narkoba dan minuman keras. Polisi yang menangkap 65 anak punk ini akhirnya menahan dan mengirim mereka ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah, Aceh Besar, untuk dibina selama 10 hari, dari 13–23 Desember 2011. Illiza juga mengatakan bahwa pembinaan dan kebutuhan mereka selama pembinaan, sudah ditanggung Pemerintah Kota Banda Aceh (Warsidi, 2011).

Berita tentang penangkapan punk di Aceh ini meluas hingga terdengar sampai ke beberapa media internasional. Berbagai tanggapan muncul karena adanya berita ini. Sebagian ada di pihak yang mendukung terhadap penangkapan ini karena anak punk adalah penyakit yang harus dihilangkan. Tapi ada juga pihak yang kontra karena ini sama saja diskriminatif terhadap punk dengan melarang kebebasan berekspresi.

Seorang aktivis setempat, Evi Narti Zain mengkritik tindakan penangkapan oleh polisi dan pemerintah Aceh tak beralasan dan melanggar HAM. Bahkan beberapa media asing pun memberitakan kasus ini, bahwa penangkapan dan penggundulan ini sudah melanggar HAM. Beberapa media asing yang dimaksud, yakni New York Daily, The Telegraph, Washington Post, Daily Mail, Sydney Morning Herald, CBS News dan sebagainya. (detikNews, 2011)

Fenomena ini menarik perhatian masyarakat luas termasuk dari jurnalis dan produser berkewarganegaraan asing yaitu Maria Bakkalapulo dan Niall Macaulay dengan membuat karya film dokumenter berjudul *Street punk! Banda Aceh*. Film ini juga berhasil menarik perhatian dan mengundang rasa kagum penikmat film Indonesia di London, Inggris. Film ini ditayangkan dalam Festival Film Indonesia yang bertemakan "Films of The Archipelago," yang diadakan di Deptford Cinema, bioskop berbasis komunitas di wilayah Tenggara London, dari tanggal 4 sampai dengan 26 Maret 2017 (Maharani, 2017).

Dalam film tersebut menceritakan tentang komunitas punk ini terbentuk setelah terjadinya Tsunami yang menewaskan 167.000 orang di Aceh pada 26 Desember 2004. Banyak dari anak-anak korban Tsunami yang kehilangan keluarganya hingga akhirnya ikut bergabung dalam komunitas punk dan merasakan memiliki keluarga baru. Walaupun begitu, Pemerintah Kota Aceh bersikeras untuk menghilangkan komunitas punk ini karena dianggap sebagai penyakit masyarakat. Walaupun dianggap sebagai penyakit masyarakat, komunitas punk ini menolak untuk dihancurkan dan mempertahankan identitas mereka sebagai anak punk. Mereka juga berjuang untuk menjalani hidup mereka agar bebas dari tekanan yang ada di Aceh. Pemerintah Aceh dan masyarakat berupaya untuk menghapus jati diri mereka sebagai punk. Namun, komunitas ini juga berusaha melawan pemerintahan dengan mencoba membuat suara agar pendapat mereka didengar. Di dalam film ini mereka juga berusaha agar dapat diterima oleh masyarakat, dengan cara memberikan makanan gratis kepada masyarakat Aceh dengan menunjukkan banner “Kami memberi makanan bukan bom”. Juga membuktikan walaupun mereka punk, tapi mereka tetap melaksanakan ibadah. Dengan menunjukkan dan membuktikan komunitas ini tidak seburuk yang terlihat, mereka pun berharap bisa diberi kebebasan dalam menghasilkan uang, berjuang hidup dan memastikan mereka dapat makan.

Peneliti tertarik untuk meneliti pada film *Street Punk! Banda Aceh*, bagaimana pada film ini menunjukkan bagaimana komunitas punk di Aceh mempertahankan identitas punk mereka. Walaupun masyarakat dan Pemerintah Kota Aceh berusaha membina agar identitas punk tersebut hilang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kajian semiotika John Fiske untuk menganalisis makna dan tandanya yang menjadi dua perhatian utamanya yang dikombinasikan menjadi suatu kode.

Film menjadi media massa yang berperan cukup penting dalam proses komunikasi. Tidak hanya sekedar sebagai hiburan, tetapi juga untuk memberikan informasi, pembelajaran, bahkan bersifat persuasif. Hal ini membuat film sering kali dipilih oleh sebagian besar orang untuk mengetahui informasi sekaligus hiburan. Bagi para pembuatnya pun menjadikan film sebagai karya dan media menyalurkan makna pesan yang terkandung dalam film. Film memiliki kekuatan untuk menjangkau banyak segmen

sosial, lantas membuat para ahli menyatakan bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya (Sobur, 2016: 127).

Film dokumenter dibuat dengan realitas yang ada dengan berbagai tujuan. Tujuan yang tidak pernah lepas adalah penyebaran informasi, pendidikan, dan propaganda bagi masyarakat tertentu. Seringkali film dokumenter mengangkat tema berdasarkan realitas yang ada atau masalah-masalah tertentu, seperti lembaga industri, sosial, maupun politik. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui fakta yang sebenarnya. Melalui media film dokumenter inilah fakta yang sebenarnya dapat disampaikan dengan baik kepada khalayak.

Umumnya film dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik dalam upaya mencapai efek yang diharapkan (Sobur, 2016:128). Semiotika merupakan metode yang tepat untuk penelitian ini karena semiotika mempelajari makna dan tanda. John Fiske mengemukakan teori tentang kode-kode televisi (*the codes of television*) yang muncul atau yang digunakan dalam acara televisi yang saling berhubungan sehingga terbentuk sebuah makna. Model teori ini tidak hanya digunakan pada televisi, tetapi dapat juga digunakan untuk menganalisis teks media yang lain, seperti film, iklan, dan lain-lain. Kode-kode televisi yang diungkapkan dalam teori John Fiske, bahwa peristiwa yang ditayangkan dalam dunia televisi telah diencode oleh kode-kode sosial yang terbagi dalam tiga level, yaitu level realitas, level representasi, dan level ideologi (Vera, 2014:35).

Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan, maka peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul Representasi Identitas Komunitas Punk di Aceh dalam Film *Street Punk! Banda Aceh* (Analisis Semiotika John Fiske).

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini mencoba berfokus pada identitas dalam film yang berjudul *Street Punk! Banda Aceh*.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian ini, muncul beberapa pertanyaan yang disajikan sebagai berikut:

1. Bagaimana identitas komunitas punk di Aceh dalam film *Street Punk! Banda Aceh* pada level realitas?
2. Bagaimana identitas komunitas punk di Aceh dalam film *Street Punk! Banda Aceh* pada level representasi?
3. Bagaimana identitas komunitas punk di Aceh dalam film *Street Punk! Banda Aceh* pada level ideologi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui identitas komunitas punk di Aceh dalam film *Street Punk! Banda Aceh* pada level realitas
2. Untuk mengetahui identitas komunitas punk di Aceh dalam film *Street Punk! Banda Aceh* pada level representasi
3. Untuk mengetahui identitas komunitas punk di Aceh dalam film *Street Punk! Banda Aceh* pada level ideologi

1.5 Manfaat Penelitian Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa referensi dan wawasan bagi penikmat film maupun mahasiswa jurusan ilmu komunikasi broadcast terhadap teori identitas pada punk dalam film tersebut menggunakan metode semiotika.

1.6 Manfaat Penelitian Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan wawasan lebih kepada peneliti dan masyarakat tentang bagaimana teori identitas diri yang ada pada punk dan pemahaman tentang analisis semiotika pada sebuah film.

1.7 Waktu dan Periode Penelitian

Table 1.1 Waktu dan Periode Penelitian

No.	Tahapan Penelitian	Bulan															
		Maret 2019				April 2019				Mei 2019				Juni 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mencari Informasi Awal	■	■	■													
2	Merumuskan Masalah				■	■	■	■	■								
3	Pengumpulan Data									■	■	■	■				
4	Penyusunan Proposal Penelitian													■	■	■	■

Sumber: Olahan Penulis